
**SISTEM KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
(COMMUNICATION SYSTEM IN REGIONAL DEVELOPMENT)**

Biryanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

E-mail: ravaipb@yahoo.com

ABSTRACT

Regional development is a planned effort undertaken by all development actors (government, society and business) in order to achieve regional goals based on the purpose of the state. Regional development in principle, is a process consisting of three cycles of planning, execution and evaluation. To achieve this required good cooperation and synergy among all development actors. The purpose of this study is to describe the elements and environmental of the communication system in local development and explain the communication system environment in regional development. The communication system in local development has several elements, namely: human resources, policies, technologies and institutions. On systems theory, there are three levels of system-related hierarchically or multilevel namely supra-systems, systems and subsystems. The third level of the system is relative and depends on the context or events. In the discussion of the communication system in regional development at this writing, is set development communication as a supra-systems and local government communication as a subsystems. This determination is based on the focus of this study to discuss the communication in the viewpoint of the regional administration. The communication system in local development is dynamic in line with changes in other systems. Some other systems that may affect communication systems in regional development, among others, the political system, laws, culture, social, economic, governmental, and others.

Keywords: *communication, government, regional development, system*

ABSTRAK

Pembangunan daerah adalah upaya terencana yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat dan bisnis) dalam rangka mencapai tujuan daerah berdasarkan tujuan negara. Pembangunan daerah pada prinsipnya, adalah proses yang terdiri dari tiga siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk mencapai kerjasama yang baik ini diperlukan dan sinergi antara semua pelaku pembangunan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan unsur-unsur sistem komunikasi dalam pembangunan daerah dan menjelaskan lingkungan sistem komunikasi dalam pembangunan daerah. Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah memiliki beberapa unsur yaitu sumber daya manusia, kebijakan, teknologi dan institusi. Pada teori sistem, ada tiga tingkatan sistem yang berhubungan secara hirarki atau multilevel yaitu suprasistem, sistem dan subsistem. Ketiga tingkatan dari sistem ini bersifat relatif dan tergantung pada konteks atau peristiwa. Pada pembahasan tentang sistem komunikasi dalam pembangunan daerah dalam tulisan ini, ditetapkan komunikasi pembangunan sebagai suprasistem dan komunikasi pemerintahan daerah sebagai subsistemnya. Penentuan ini berdasarkan fokus penelitian ini untuk membahas komunikasi dalam

sudut pandang pemerintahan daerah. Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah adalah dinamis sejalan dengan perubahan sistem lain. Beberapa sistem lain yang dapat mempengaruhi sistem komunikasi dalam pembangunan daerah, antara lain, sistem politik, hukum, budaya, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lainnya.

Kata kunci: komunikasi, pembangunan daerah, pemerintah, sistem

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya terencana yang dilaksanakan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik. Adanya upaya terencana ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses sistematis dan terukur. Pada sistem pembangunan di Indonesia, konsep pembangunan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional itu sendiri meliputi pembangunan pusat dan daerah. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa Pembangunan daerah merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam

rangka mencapai tujuan daerah yang didasarkan pada tujuan bernegara.

Memaknai dari konsep pembangunan daerah yang telah diuraikan sebelumnya tergambar jelas bahwa pembangunan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah seutuhnya, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dari semua pelaku pembangunan yang juga memiliki kontribusi dalam keberhasilan pembangunan. Peran pemerintah sesungguhnya adalah menjadi penggerak dan pelaksana utama berjalannya roda pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama dan sinergisitas yang baik antara semua pelaku pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat efektif yaitu terealisasi dengan tepat waktu dan sasaran. Adanya kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pelaku pembangunan juga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang efisien yaitu penggunaan modal dan sumberdaya

pembangunan secara cermat dengan hasil yang optimal.

Pelaksanaan pembangunan pada prinsipnya bukanlah merupakan proses yang berdiri sendiri, tetapi sebagai tahapan dari siklus pembangunan sebelumnya yaitu perencanaan. Tata kelola perencanaan pembangunan Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU 25 tahun 2004, disebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selanjutnya, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Pada tahapan perencanaan pembangunan ini, diperlukan hasil evaluasi dari pembangunan sebelumnya, sehingga perencanaan yang dirumuskan merupakan langkah maju (*progress*) dan menjadi perbaikan dari pembangunan yang telah dicapai.

Mewujudkan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang meliputi semua tahapan pembangunan, membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait. Peran pemerintah pusat sebagai penyusun kebijakan pembangunan di tingkat nasional harus memperhatikan kebutuhan dan harapan dari daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan pembangunan daerah hendaknya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain pelaku pembangunan seperti dunia usaha dan masyarakat harus dapat menempatkan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mensukseskan pembangunan di daerah. Keterlibatan dari semua pihak dalam pembangunan daerah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan berbagai peran dan tanggung jawabnya, mengindikasikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan jaringan kerja terpadu yang bertujuan untuk menyelenggarakan

pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Prinsip dalam pembangunan daerah didasarkan pada asas-asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah asas keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang benar tentang tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pentingnya asas keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tentu saja tidak sekedar sebagai akses informasi, tetapi diharapkan dapat mendorong peran aktif dari semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi secara nyata. Meningkatnya partisipasi dan dukungan dari semua pelaku pembangunan akan berjalan efektif bila ada kerjasama dan koordinasi dari semua pihak terkait. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan sistem komunikasi pembangunan daerah yang dapat menjadi panduan bagi setiap pelaku pembangunan dalam melaksanakan peran dan tugasnya secara optimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penulisan ini adalah untuk

menguraikan unsur-unsur sistem komunikasi dalam pembangunan daerah dan menjelaskan lingkungan sistem komunikasi dalam pembangunan daerah. Penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai kajian dalam membangun dan mengembangkan sistem komunikasi pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan cepat dan tepat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional.

SISTEM KOMUNIKASI

Sistem berasal dari bahasa Yunani "*systema*" yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich *dalam* Nurudin, 2007). Kata Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susanto (2000) sistem adalah kumpulan/*group* dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan

bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem secara umum menurut Sutanta (2003) didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Selanjutnya menurut Kristanto (2008) sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur- prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa sistem adalah kesatuan bagian-bagian fungsi yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dan membentuk totalitas sebagai wujud dari interaksi.

Berdasar teori sistem umum yang dikemukakan Arifin (2011) dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem terdapat struktur, fungsi dan evolusi. Hubungan struktural dapat terjadi dari segi ruang (kiri, kanan, depan dan belakang) dan segi status (atasan, bawahan, teman sekerja).

Hubungan fungsional berkaitan dengan tindakan atau perilaku (menghibur, memberi informasi, mengawasi dan lainnya. Hubungan evolusioner menunjuk kepada riwayat sistem dalam waktu tertentu tentang hubungan struktural dan hubungan fungsional serta perubahan dan perkembangannya secara evolusi atau bertahap. Perilaku sistem yang paling teratur hanya dapat dijumpai dalam sistem fisik (alam, fisika dan teknologi) sehingga seluruhnya dapat diprediksi secara tepat (*predictable*), sedangkan perilaku sistem sosial sangat tidak teratur sehingga sulit dilakukan prediksi secara tepat (*unpredictable*).

Lebih lanjut Arifin (2011) menjelaskan bahwa dalam sebuah sistem dikenal dengan istilah prinsip keterbukaan dan dalam teori sistem terdapat klasifikasi atas besar kecilnya keterbukaan itu, yaitu sistem yang relatif terbuka (berinteraksi dengan lingkungannya) seperti sistem sosial dan sistem yang relatif tertutup (hampir tidak berinteraksi dengan lingkungannya) seperti yang ditemukan pada mesin. Pada sistem yang relatif terbuka terdapat perilaku sistem yang kurang

terbuka (birokrasi sipil, militer) dan ada perilaku sistem yang terbuka (keluarga). Menurut Laszlo *dalam* Arifin (2011), secara sistemik terdapat tiga level sistem yaitu suprasistem, sistem dan subsistem yang memiliki hubungan hierarkis (sistem sosial, sistem komunikasi dan sistem media massa). Dalam teori sistem disebutkan bahwa pada dasarnya sesuatu itu disebut suprasistem, sistem dan subsistem tergantung dari hubungannya dengan sistem yang lain.

Pemahaman lebih lanjut tentang sistem ini dijelaskan oleh Littlejohn dan Foss (2005) yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh sifat sistem yaitu: (1) suatu sistem adalah suatu keseluruhan yang unik, karena bagian-bagiannya berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipahami secara terpisah; (2) sistem mempunyai hirarki, ada sistem yang lebih besar dimana suatu sistem adalah satu bagian disebut suprasistem, dan sistem yang lebih kecil mengandung suatu sistem disebut subsistem; (3) sistem-sistem paling sering dipandang sebagai organisasi yang berorientasi kepada tujuan; (4) sistem-sistem berinteraksi

dengan lingkungannya; (5) salah satu tugas dari suatu sistem, jika ia tetap hidup, adalah tinggal dalam keseimbangan; (6) untuk menjaga agar sistem terus eksis dalam suatu lingkungan maka diperlukan dinamika sistem dalam beradaptasi; (7) finalitas adalah tujuan yang dicapai atau penyelesaian tugas dari suatu sistem. *Equifinality* adalah suatu keadaan final tertentu bisa jadi diselesaikan dengan cara-cara yang berbeda dan titik-titik awal yang berbeda.

Berbagai teori tentang sistem tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami sistem komunikasi sebagaimana yang dikemukakan Nurudin (2007) yang mendefinisikan sistem komunikasi sebagai sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan tersebut menjadi sumber informasi. Sistem komunikasi setidaknya mencakup empat hal yaitu: (1) sekumpulan unsur

(wartawan, karyawan, komputer, mesin, barang, buku dan fasilitas lainnya; (2) tujuan sistem (menyebarkan informasi pada khalayak, membentuk *image* positif dalam humas, persuasi); (3) wujud hasil kegiatan atau proses sistem selama jangka waktu tertentu (media cetak, penerbitan interen, *press release*); (4) pengolahan data, energi atau bahan berita.

Arifin (2011) pada hakikatnya sistem komunikasi adalah sistem sosial karena komunikasi tidak hanya terjadi dalam sistem sosial, tetapi juga menentukan sifat dan eksistensi sistem sosial itu. Titik temu antara sistem komunikasi dengan sistem sosial adalah terletak pada fungsi komunikasi sebagai perekat hidup bersama. Sistem komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai tatanan, cara, metode, pola atau mekanisme kerja dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang membentuk suatu totalitas dalam interaksi manusia, lebih singkatnya sistem komunikasi adalah tatanan interaksi manusia melalui informasi (pesan dan tindakan) yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab. Sistem komunikasi Indonesia

merupakan kajian yang bersifat multidisipliner yang terkait dengan bidang-bidang lainnya terutama politik, sosiologi, ekonomi, hukum, budaya dan sejarah.

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Untuk menyelenggarakan pembangunan diperlukan perencanaan yang baik agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal. Menurut Terry dalam Herujito (1996), *planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulating of proposed activities believed necessary to achieve desired results.* Dari definisi tersebut, Herujito (1996) menyimpulkan tiga hal terkait perencanaan yaitu: (1) perencanaan harus didasarkan pada fakta, data dan keterangan yang konkret; (2) perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke masa yang akan datang; (3)

perencanaan menyangkut tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan yang akan terjadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan bersifat dinamis, berkesinambungan dan fleksibel yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan keadaan yang terjadi.

Perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan tujuan untuk 1) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, 2) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas, 3) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Tjokroamidojo (2003) perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, adalah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan

yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. Hesselbein dan Johnston (2005) mengemukakan bahwa proses perencanaan yang baik bukan sekedar kegiatan matematis dan politik tetapi diperlukan relevansi dengan kinerja, sehingga rencana yang dilakukan dapat terukur. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan penting dilakukan guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan pelakunya menurut Innes dan Booher (2000) dapat dibedakan dalam beberapa model, yaitu 1) *Technical Bureaucratic Planning*, perencanaan berbasis penilaian birokrasi atas alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan analisis komparatif serta proyeksi, 2) *Political Influence Planning*, perencanaan adalah elit pimpinan daerah atau anggota legislatif yang terpilih, 3) *Social Movement*

Planning, perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak mempunyai kekuatan, bergabung bersama dengan tujuan yang sama, 4) *Collaborative Planning*, setiap partisipan bergabung untuk mengembangkan misi dan tujuannya, menyampaikan kepentingannya untuk diketahui bersama, mengembangkan saling pengertian, dan kemudian bekerja melalui serangkaian tugas yang disepakati untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut GTZ (2000) perencanaan pembangunan daerah adalah upaya sistematis beberapa pelaku (*stakeholders*) dari masyarakat, swasta dan sipil domain di tingkat yang berbeda untuk menangani aspek fisik dan sosial-ekonomi saling tergantung dengan cara terus menerus menganalisis kondisi pembangunan daerah, merumuskan tujuan pembangunan daerah dan kebijakan, konseptualisasi strategi untuk solusi dan mengimplementasikannya dengan sumberdaya yang tersedia sehingga celah baru yang meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal dapat dimanfaatkan pada secara berkelanjutan.

Berdasarkan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

UNSUR-UNSUR SISTEM KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah merupakan kesatuan bagian-bagian fungsi yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dan membentuk totalitas sebagai interaksi manusia atau lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Komunikasi sebagai sistem memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena fungsinya sebagai “jembatan” penghubung antara

kebutuhan dan harapan dari setiap subjek pembangunan. Melalui komunikasi juga akan memperjelas peran dan fungsi dari semua pelaku pembangunan, sehingga akan terjadi sinergi dan kerjasama yang harmonis antara pelaku pembangunan. Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah tersebut memiliki beberapa unsur yaitu sumberdaya manusia, kebijakan, teknologi dan lembaga.

Sumberdaya manusia dalam sistem komunikasi pembangunan daerah merupakan individu atau orang perorang yang melakukan komunikasi secara langsung ataupun melalui media. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yaitu informasi tentang penyelenggaraan negara yang terkait dengan kepentingan publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Kemampuan berkomunikasi individual seorang kepala daerah, pejabat pemerintahan ataupun pegawai aparatur sipil negara selaku penggerak roda pemerintahan sangat menentukan keberhasilan komunikasi pembangunan. Pada beberapa kasus, kemampuan berkomunikasi individual dapat melampaui batas hubungan antarlembaga, sehingga sekat atau batas formal dapat dihindarkan. Kesantunan berbudaya merupakan salah satu kunci dalam melakukan komunikasi efektif antarindividu ini yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan daerah. DeVito (1997) menyebutkan terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, yaitu: keterbukaan (*openess*), saling mendukung (*supportivenes*), bersikap dan berfikir positif (*positiveness*), pahami perasaan mitra

bicara (*emphaty*) dan kesetaraan (*equality*).

Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pusat atau nasional, kebijakan pembangunan didasarkan pada empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada pembangunan daerah, selain mempedomani pada kebijakan nasional juga didasarkan pada kebijakan daerah yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka jelas sistem komunikasi dalam pembangunan setiap daerah akan berbeda pula karena adanya kekhasan kebutuhan dan kebijakan pada masing-masing daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional mempedomani asas-asas umum penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas

Unsur penting selanjutnya dalam sistem komunikasi pembangunan daerah adalah teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, banyak kepala daerah yang dapat senantiasa berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya melalui berbagai aplikasi komunikasi yang sudah semakin bervariasi. Teknologi juga memudahkan komunikasi antarpelaku pembangunan sehingga kebijakan pembangunan dapat menyebar secara cepat dan aspirasi dari *stakeholders* dapat direspon dengan cermat dan cepat pula. Pemanfaatan teknologi komunikasi juga sangat membantu dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pemanfaatan teknologi komunikasi diperlukan tidak hanya pada saat pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pada tahapan perencanaan maupun evaluasi. Pada perencanaan pembangunan daerah, pemerintah

berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), yaitu forum antarpelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Melalui pemanfaatan teknologi komunikasi ini, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan musrenbangda dengan terbuka dan fleksibel serta mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat luas, baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada sistem komunikasi dalam pembangunan daerah juga tidak terlepas dari adanya unsur lembaga, baik itu bersifat formal maupun nonformal. Dalam menyelenggarakan pembangunan pemerintah daerah perlu melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga terkait. Selain dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, juga sangat penting untuk membangun hubungan dengan unsur pemerintahan lainnya seperti instansi vertikal di daerah, lembaga penegak hukum, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Keberadaan lembaga-lembaga ini tentu akan

mempengaruhi sistem komunikasi yang dilaksanakan dalam pembangunan daerah.

LINGKUNGAN SISTEM KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Komunikasi pembangunan daerah sebagai suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sistem-sistem lainnya. Dalam teori sistem, terdapat tiga level sistem yang berhubungan secara hierarkis atau bertingkat. Ketiga level sistem tersebut bersifat relatif dan sangat tergantung dengan konteks ataupun peristiwa. Dalam tulisan ini, jika komunikasi dalam pembangunan daerah ditetapkan sebagai sistem maka suprasistemnya bisa saja sistem sosial, komunikasi dalam pembangunan nasional, komunikasi pembangunan dan lainnya. Sedangkan untuk subsistem dapat saja komunikasi pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, media komunikasi pembangunan daerah dan lainnya. Dari hal ini dapat dirumuskan bahwa suprasistem, sistem dan subsistem ditentukan dari fokus kajian yang dibahas dan guna memperjelas

hubungan dari masing-masing sistem.

Di sisi yang lain, komunikasi pemerintahan daerah bisa saja menjadi sistem bila suprasistemnya komunikasi pembangunan daerah dan subsistemnya adalah komunikasi aparatur pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya suatu sistem dapat berubah menjadi suprasistem atau subsistem bila dihubungkan dengan lingkungan lainnya. Pada pembahasan tentang sistem komunikasi dalam pembangunan daerah pada tulisan ini, ditetapkan komunikasi pembangunan sebagai suprasistem dan komunikasi pemerintahan daerah sebagai subsistemnya. Penetapan ini didasarkan pada fokus kajian ini untuk membahas tentang komunikasi dalam sudut pandang pemerintahan daerah.

Adapun sistem-sistem lain yang dapat mempengaruhi sistem komunikasi dalam pembangunan daerah antara lain sistem politik, hukum, budaya, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lainnya. Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah bersifat dinamis sejalan dengan perubahan pada sistem-

sistem lainnya. Memahami lingkungan dalam sistem komunikasi pembangunan daerah akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas komunikasi yang dilakukan untuk pembangunan daerah. Sistem Komunikasi dalam pembangunan daerah melibatkan semua pelaku pembangunan. Terdapat dua forum formal dalam kegiatan komunikasi pembangunan daerah, yaitu musrenbangda dan musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda). Pola komunikasi pada musrenbangda cenderung vertikal yaitu dari bawah ke atas, sedangkan pada musyawarah Forkopimda cenderung horisontal dan bersifat koordinasi.

Sebagai suatu sistem, komunikasi dalam pembangunan daerah membutuhkan interaksi dengan sistem lainnya. Hal ini penting agar sistem komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjadi penyokong utama pembangunan daerah. Ketidakberhasilan sistem komunikasi yang dibangun untuk menyesuaikan dengan sistem-sistem lainnya akan menyebabkan komunikasi pembangunan daerah akan sulit

mencapai tujuan yang diharapkan. Terkait dengan hal tersebut diperlukan analisis terhadap sistem-sistem yang memiliki potensi untuk mempengaruhi sistem komunikasi yang dibangun. Pada lingkungan sistem komunikasi juga tidak mungkin akan muncul sistem-sistem baru yang memungkinkan sistem komunikasi menjadi lebih maju atau justru dapat menjadi ancaman atau hambatan bagi sistem komunikasi itu sendiri. Sistem yang kuat bukanlah sistem yang konsisten dan statis, melainkan sistem yang mampu aktif dan mampu beradaptasi dengan berbagai sistem dan perubahan.

KESIMPULAN

Sistem komunikasi dalam pembangunan daerah merupakan kesatuan bagian-bagian fungsi yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dan membentuk totalitas sebagai interaksi manusia atau lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Komunikasi sebagai sistem memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena fungsinya sebagai garis penghubung antara semua pelaku pembangunan. Sistem

komunikasi dalam pembangunan daerah memiliki beberapa unsur yaitu sumberdaya manusia, kebijakan, teknologi dan lembaga. Berdasarkan teori umum sistem, terdapat tiga level sistem yang berhubungan secara hierarkis. Ketiga level sistem tersebut bersifat relatif dan sangat tergantung dengan konteks ataupun peristiwa. Pada pembahasan tentang sistem komunikasi dalam pembangunan daerah, ditetapkan komunikasi pembangunan sebagai suprasistem dan komunikasi pemerintahan daerah sebagai subsistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin A. 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- DeVito JA. 1997. Komunikasi Antar Manusia. terj. Agus Maulana. Jakarta: Professional Books.
- [GTZ] Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 2000. Local Development Planning (Pengembangan Ekonomi Lokal). Jakarta: GTZ Office.
- Herujito YM. 1996. Dasar-Dasar Manajemen: Pendekatan Proses, Fungsi, Sistem, Teknik dan Manusiawi. Bogor: IPB.
- Hesselbein F dan Johnston R. 2005. A Leader to Leader Guide: On High Performance Organization. terj. Mariantio Samosir. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Innes JE dan Booher DE. 2000. Public Participation in Planning New Strategies for the 21st Century. Berkeley: University of California.
- Kristanto, A. 2008. Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Littlejohn SW and Foss KA. 2005. Theories of Human Communication. Eight Edition. Canada: Wadsworth.
- Nurudin. 2007. Sistem Ekonomi Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto A. 2000. Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangannya. Bandung: Linggajaya.
- Sutanta E. 2003. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirojuzilam dan Mahalli K. 2010. Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi. Medan: USU Press.
- Tjokroamidjojo B. 2003. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Usmara dan Dwiantara L. 2004. Strategi Organisasi. Yogyakarta. Amara Books.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.